
Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore

**Rifani Djaenal¹
J. E. Kaawoan²
Ismail Rachman³**

ABSTRAK

Problematika Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi Di Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Adapun tiga pandangan mengenai kemiskinan yaitu: (1) kemiskinan berarti tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar untuk menjaga keberlangsungan kehidupan; (2) rendahnya pendapatan harus diukur secara subyektif, yakni relative rendah terhadap pendapatan orang lain di dalam masyarakat; (3) kemiskinan dihubungkan dengan usaha seseorang untuk mendapatkan pendapatan yang memadai. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Salah satu upaya menurunkan tingkat kemiskinan adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Program BPNT ini pertama kali diterapkan pada awal tahun 2017 dan telah dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa, dan 3 kota di wilayah Timur. Usaha memerangi kemiskinan sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan bantuan pangan non tunai (BPNT) Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan di kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kata Kunci : Kemiskinan, Bantuan Pangan Non Tunai

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Problematika Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi Di Indonesia. Adapun tiga pandangan mengenai kemiskinan yaitu: (1) kemiskinan berarti tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar untuk menjaga keberlangsungan kehidupan; (2) rendahnya pendapatan harus diukur secara subyektif, yakni relative rendah terhadap pendapatan orang lain di dalam masyarakat; (3) kemiskinan dihubungkan dengan usaha seseorang untuk mendapatkan pendapatan yang memadai.

Kemiskinan menentukan tingkat perkembangan suatu masyarakat dan menjadi salah satu indikator tidak berhasilnya proses pembangunan. Masalah kemiskinan terus menjadi persoalan masyarakat dan negara di dunia ini dari masa ke masa. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan. Usaha memerangi kemiskinan sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Pemerintah juga terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan program penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor kehidupan yaitu: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Salah satu upaya menurunkan tingkat kemiskinan adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Dalam pasal 1 ayat (4) peraturan ini menjelaskan bahwa bantuan pangan non tunai yang selanjutnya di

singkat BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong yang bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (BRI, BTN, dan Mandiri). Program BPNT ini pertama kali diterapkan pada awal tahun 2017 dan telah dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa, dan 3 kota di wilayah Timur. Jumlah KPM yang akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai di Indonesia yaitu berjumlah 1,286.194 jiwa, dengan total bantuan yang diberikan senilai Rp 1,7 triliun. Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial Kota Tidore juga melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) program pengganti Rastra tahun 2018. Untuk meningkatkan eektivitas dan ketepatan sasaran program, maka Rastra diamanatkan agar dapat bertransformasi dari pola subsidi menjadi pola bantuan sosial (BANSOS) pangan, di mana bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai, sehingga dari sisi penerima manfaat, penyaluran bantuan sosial non tunai ini akan mendorong perilaku produktif penerima bantuan dan menunjukan akumulasi aset masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan kesempatan menabung.

Untuk keberhasilan program ini kedepannya perlu dukungan dengan berbagai upaya diantaranya mengawasi secara bersama-sama struktur birokrasi dalam proses peyaluran BPNT, serta kepedulian kita semua dalam memverifikasi dan validasi data yang di laksanakan oleh instansi terkait, dalam hal ini dinas sosial serta petugas lapangan yaitu tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) di wilayah kecamatan masing-masing beserta pendampingnya, sehingga kedepannya program ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak salah sasaran. Permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan upaya penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai

aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Dinas Sosial Kota Tidore juga berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi yaitu dengan cara melakukan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Tidore dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tidore.

Tinjauan Pustaka

• Implementasi Kebijakan

Suharto (2014:79) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan pada intinya menunjukkan pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstrak yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan.

Kesimpulan menurut Suharto, sebuah kebijakan dalam proses perencanaannya harus menuju perubahan yang lebih transparan, tidak abstrak dan dalam penerapan sebagai kebijakan merupakan sebuah tujuan, sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah kegiatan-kegiatan untuk mencapai kebijakan.

Setiawan (2004:39) Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara ujian dan tindakan mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Alur kegiatan tersebut mencakup; pertama, persiapan seperangkat aturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijakan secara kongkrit ke masyarakat.

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) dalam (wahab 2008:65) implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan

kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara yang mencangkup baik usaha-usaha untuk mengadiministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo, 2009:192) Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu atau kelompok, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik yang dimaksud adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang di dalamnya termasuk manusia, dana, dan kemampuan operasional, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

• Pengertian Program

Menurut Darwanto S.S (1992:19) program merupakan suatu tampilan yang dibuat dalam suatu acara agar acara tersebut dapat menarik para pendengar, sedangkan menurut Sumar (dalam Saleha, 2005:26) program didefinisikan sebagai usaha-usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan pada meningkatnya pembangunan pada suatu sector tertentu untuk mencapai beberapa proyek. Program juga dapat dipahami sebagai kegiatan social yang teratur mempunyai tujuan yang jelas dan khusus serta dibatasi atas proyek-proyek pembangunan.

Sedangkan Menurut Yulikuspartono (2009:29) Program yaitu merupakan sedangkan instruksi atau berupa statement dalam bahas yang dimengerti oleh computer yang bersangkutan, sedangkan menurut pendapat Sukrisno program adalah kata, ekspresi atau pernyataan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur, yang berupa untuk langkah, untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan Bahasa pemrograman.

- **Konsep Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

1. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai, disingkat Bpnt, adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warung yang bekerja sama dengan Bank Penyalur (Pedoman Umum BPNT, 2018:3). (Kemensos, 2017:9) Bantuan sosial pangan non tunai dilakukan dengan cara mengirimkan uang sebesar Rp 110.000, per bulan bagi penerima program melalui sebuah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS merupakan instrument penyaluran yang dapat dibelanjakan barang-barang sembako seperti beras dan/telur sesuai kebutuhan di E-Warung, bantuan dapat disisakan dan terakumulasi dalam rekening Bantuan Pangan. Menurut buku pedoman BPNT (2018:4), dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negera.
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan.

2. Adanya program ini yaitu diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemenuhan kebutuhan sebagai kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). (pedoman Umum bpnt,2018:10)

Adpun berbagai manfaat yang dirasakan Keluarga Penerima Manfaat:

1. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial
3. transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Non Tunai (GNNT)
4. Meningkatnya perumbuhan ekonomi di daerah terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

- **Konsep Kemiskinan**

- a. Pengertian Kemiskinan

Secara harfiah Kamus besar Bahasa Indonesia, miskin itu berarti tidak berharta benda. Miskin juga berarti tidak mampu mengimbangi tingkat kebutuhan hidup standard dan tingkat penghasilan dan ekonominya renda. Secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Defenisi kemiskinan dapat ditinjau dari tinjauan ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi kemiskinan adalah kekurangan sumber daya yang dapat

digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara social kemiskinan diartikan kekuarangan jaringan social dan struktur untuk mendapatkan kesempatan meningkat produktivitas. Sedangkan secara politik kemiskinan diartikan kekurangan akses terhadap kekuasaan (Effendi, 1993:201-204). Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berlalunya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Mikelsen, 2003: 194). Kemiskinan mesnunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak bias dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya (Soegijoko, 1997: 137).

Menurut Sar A. Levitan dalam Ala (1981:3) menyatakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Rusli dkk (1995:51-52) harus dibedakan antara kemiskinan, ketidakmerataan, keterisolasian dan keterbelakangan. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana orang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi standar kebutuhan minimum tertentu. Ketidakmerataan lebih menekankan pada standar hidup relatif diantara anggota masyarakat. Keterisolasian menyangkut ketidak mampuan sekelompok orang untuk berhubungan secara tertentu dan mudah dengan masyarakat lainnya, sedangkan keterbelakangan menyangkut kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai kebutuhan serta kondisi kehidupan yang lebih baik.

b. Ciri-ciri kemiskinan

Kemiskinan memiliki ciri dimensi ekonomi yang bermakna tidak mempunyai harta, tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik, dan dimensi sosial yang bermakna akses di ruang publik dengan rendahnya pendidikan dan ketermapilan yang berguna untuk kehidupannya sehingga terdapat ciri kemiskinan terutama pada keluarga fakirmiskin

(Suharto, 2009) yitu :Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar;

- a. Tidak mampu berusaha karena sakit, cacat fisik atau mental;
 - b. Tidak mampu berfungsi sosial;
 - c. Rendahnya sumber daya manusia;
 - d. Rentan terhadap keguncangan baik individu maupun masa;
 - e. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan;
 - f. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lain (seperti kesehatan dan lain-lain);
 - g. Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat.
- c. Jenis-jenis kemiskinan
- a. Kemiskinan absolut atau mutlak, yaitu berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan (*poverty line*) yang sifatnya tetap tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu masyarakat. Garis kemiskinan (*poverty line*) adalah kemampuan seorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada satu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Secara umum kemiskinan absolut adalah kondisi kemiskinan yang terburuk yang di ukur dari tingkat kemampuan suatu keluarga dalam membiayai kebutuhan yang paling minim untuk dapat hidup sesuai dengan taraf hidup kemanusiaan yang palin rendah.
 - b. Kemiskinan relifan, yaitu pada dasarnya menunjukkan pada perbedaan relifan tingkat kesejahteraan antara kelompok masyarakat. Mereka yang

berada di lapisan terbawah dalam presentil derajat kemiskinan suatu masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin. Dalam kategori seperti ini, dapat saja mereka yang di golongkan sebagai miskin sebenarnya sudah dapat mencukupi hal dasarnya namun tingkat keterpenuhannya berada dilapisan terbawah.

- c. Kemiskinan struktural, yaitu lebih menuju kepada orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakat yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah. Jika di kaji dari defenisi, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak mampu memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi merek. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi bukan dikarenakan ketidakmampuan si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja.
- d. Kemiskinan situasional atau kemiskinan natural, yaitu kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin.
- e. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan penduduk terjadi karena kultur atau budaya masyarakatnya yang sudah turun temurun yang membuat mereka menjadi miskin.

Namun menurut Ginandjar Kartasasmita dalam Ridlo (2001:11), pembagian jenis kemiskinan dapat dibagi berdasarkan pola waktu, kemiskinan dapat dibagi menjadi 4 bagian yaitu: (1) *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun yang diantaranya merupakan daerah kritis sumber daya alam atau terisolasi. (2) *cyclical poverty* yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. (3) *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan manusia seperti sering dijumpai kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan. (4) *accidental poverty*, yaitu kemiskinan yang terjadi karena bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

- d. Faktor Penyebab Kemiskinan
 - a. Kemiskinan Natural

Kemiskinan Natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin, kelompok masyarakat menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan atau walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Menurut Baswir (1997) kemiskinan Natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, seperti karena cacat, sakit, lanjut usia, atau karena bencana alam, kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasasmita (1997) disebut sebagai "*persisten poverty*", yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada

umumnya merupakan daerah yang kritis sumber daya alamnya atau daerah yang terisolasi.

b. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan Kultural adalah mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya dimana mereka hidup tidak berkecukupan dan selalu merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan mengubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Baswir (1997) bahwa ia miskin karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros, apatis dan sebagainya.

c. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Menurut Baswir (1997) munculnya kemiskinan struktural disebabkan oleh adanya upaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakannya bermacam-macam program dan kebijakan namun, karena pelaksanaannya tidak seimbang. Pemilik sumber daya tidak merata,

kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula sehingga menimbulkan masyarakat yang timpang. Menurut Kartasasmita (1997) hal ini disebut "*accident poverty*" yaitu kemiskinan karena dampak dari satu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, (2014:1), adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu:

1. Komunikasi.
2. Sumber Daya.
3. Disposisi.
4. Struktur Birokrasi

Informan yang dipilih adalah yang benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Informan yang peneliti wawancarai terdiri dari :

1. Kepala Dinas Sosial Kota Tidore
2. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial.
3. Kepala Kelurahan Tosa.
4. Staf Kelurahan Tosa.
5. Pendamping BPNT Kecamatan Tidore Timur.
6. Agen BPNT.
7. Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pembahasan

Kelurahan Tosa terletak di Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. Kelurahan Tosa berada pada posisi dataran rendah dan 100 meter dari pesisir pantai.

1. Komunikasi
komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam penyampaian suatu kebijakan, oleh

karena itu kebijakan yang disampaikan harus dipahami dengan baik oleh pelaksananya. George C. Edward III juga menjelaskan dalam (Agustino, 2017) terdapat tiga hal yang harus dijelaskan mengenai komunikasi yaitu: *Pertama*, Transmisi, Dalam hal ini tersamisi yang dilakukan pemerintah pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Tidore lebih hususnya di Kelurahan Tosa belum menjalani komunikasi yang baik, karena sering mengalami miskomunikasi antara pemerintah setempat. *Kedua*, Kejelasan, Pemerintah pelaksana BPNT di Kelurahan Tosa belum menjalankan komunikasi dengan baik, karena masih banyak yang belum mengerti tentang prosedur BPNT, untuk itu masih perlu dilakukan sosialisasi kepada KPM dan Agen BPNT. *Ketiga*, Konsisten, Pemerintah Kota Tidore memiliki konsisten yang kurang bagus karena masih ditemukan maslaha data ganda, pinda alamat dan KPM mampu yang dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapanga. Berdasarkan pedoman umum BPNT Tahun 2018 bahwa sosialisasi dan koomunikasi program BPNT dirancang untuk terjadinya proses komunikasi, aliran informasi, dan pembelajaran pada berbagai pelaksana di pusat dan daerah, kalangan media, LSM, akademisi dan masyarakat, termasuk peserta/KPM BPNT, terutama di daerah yang sedang menjalankan program BPNT. Tersosialisasinkannya BPNT kepada semua pihak, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, merupakan kunci kesuksesan BPNT. Untuk itu disusun strategi komunikasi dan sosialisasi BPNT yang komperhensif. Strategi komunikasi dan sosialisasi ini tidak hanya memfokuskan pada aspek implementasi dan keberhasilan pelaksana program BPNT, tetapi juga aspek pengembangan kebijakan, khususnya dalam membangun dukungan dan komitmen untuk

melembagakan program BPNT dalam bentuk Sistem Jaminan Sosial.

2. Sumber Daya

Edward III dalam Agustino (2006: 158-159), sumberdaya merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari, staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Implementasi suatu kebijakan akan bergantung pada kondisi sumber daya itu sendiri, meskipun perintah-perintah implementasi diteruskan (diteransmisikan) secara cermat, jelas dan konsisten, apabila memiliki kekurangan sumber-sumber yang diperlukan oleh pelaksana untuk menjalankan kebijakan, maka akan menimbulkan masalah dalam proses implementasi. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerima Bantuan Pangan bagi KPM. Dilihat dari tujuan Program BPNT tentunya akan mudah dicapai dengan maksimalnya peran dan fungsi dari sumber daya yang dibutuhkan. Sumber Daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Sumber daya dalam proses implemntasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat penting karena meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melasanakan tugas-tuga mereka, wewenang dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur. Dalam proses implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Sumber Daya (SD) merupakan subjek dari proses implementasi ini. Fasilitas atau alat yang digunakan e-warung berupa kartu kombo (KKS dan kartu ATM) dan mesin EDC. Adapun

uraian mengenai Sumber Daya dalam mendukung proses penyaluran BPNT di Kelurahan Tosa. TKS dan pendamping BPNT sebagai sumber daya dalam melakukan tugasnya harus melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan baik dan beberapa fasilitas sebagai sumber daya pendukung untuk keutuhan pada saat penyaluran harus tersedia dan dapat digunakan dengan baik pula.

3. Disposisi

Menurut George C. Edwards III dalam (Abdullah,2017) mengatakan bahwa disposisi merupakan hal ketiga dalam implementasi kebijakan. Adapun faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam (Agustinus,2006) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan nyata terhadap implementasi kebijakan bila personal yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pelaksanaan kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
2. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Maksimal atau tidaknya sebuah kebijakan implementasi itu juga ditentukan oleh sikap pelaksana dan pemerintah setempat, adanya sebuah dukungan yang

diberikan oleh pemerintah ataupun tingkat kemauan yang tinggi yang dimiliki oleh pihak pelaksana itu akan membantu memaksimalkan proses berjalannya sebuah implementasi. Proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat dibutuhkan pelayanan yang baik dan sikap yang ramah dari pihak pelaksana kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dalam hal ini adalah masyarakat miskin yang menjadi peserta dalam program BPNT. Para pemerintah pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai yang terlibat di dalam program ini khususnya di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur sudah menjalankan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing dengan baik. Akan diuraikan bagaimana sikap pemerintah dan pelaksana dalam proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur. Pemerintah setempat dan pihak pelaksana dalam implementasi program ini harus memberikan dukungan dan memberikan pelayanan baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi mencapai dua hal yang penting, pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksanaan sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme

dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksana kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini bisa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi public swasta. Dengan menggunakan SOP, Prara pelaksana dapat juga memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu SOP juga dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi-organisasi yang sangat kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang dapat di pindahkan dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain) dan kesamaan yang besar dalam melakukan penerapan peraturan-peraturan. Menurut Agustino (2014) SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksanaan kebijakan/ adiministrator/ birokrat) untuk bisa melaksanakan bentuk kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Aspek kedua adalah fregmentasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Dalam hal pelaksanaan, melalui struktur birokrasi yang jelas maka Standar Oprasional Prosedur (SOP) akan terlaksana dengan baik. Adapun pada proses implementasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur, semua pihak ikut serta dalam membantu berjalannya penyaluran tersebut baik dari pihak pemerintah setempat, tim koordinasi tingkat Kecamatan maupun dari aparat keamanan. Semua pihak tersebut menjalankan tugasnya masing-masing berdasarkan aturan yang ada dan saling menjalin komunikasi terkait proses

penyaluran BPNT di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur

Penutup

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Komunikasi yang terjadi di dalam implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dinas sosial dalam menanggulangi kemiskinan di kelurahan tosa belum terlaksana dengan baik karena masi banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang prosedur pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
2. Fasilitas atau alat yang digunakan dalam pelaksanaan program BPNT masi sering mengalami gangguan/eror serta jarak antar rumah KPM dan e-warung sangat jauh sehingga menyebabkan KPM merasa kesulitan pada saat pengambilan bantuan dan dari program BPNT tersebut masih belum bisa mencukupi kebutuhan pangan KPM.
3. Dukungan ataupun sikap dan pelayanan dari pihak pelaksana dan pemerintah setempat sudah direalisasikan dengan baik kepada masyarakat. Semua pihak ikut serta dalam membantu berjalannya proses sosialisasi hingga penyaluran BPNT kepada KPM.
4. semua pihak pemerintah setempat maupun pemerintah daerah yang terlibat di dalam proses pelaksanaan penyaluran Program BPNT sudah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan aturan yang telah di buat oleh pemerintah pusat.

Saran

1. Pemerintah, masyarakat dan pihak yang terkait dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus melakukan pertemuan tiap bulannya dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) guna untuk melakukan sosialisasi agar msasyarakat penerima bantuan lebih memahami tentang prosedur program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

2. Pemerintah perlu menambahkan jumlah dana BPNT yang diberikan agar dapat memenuhi sebagian kebutuhan pokok pangan masyarakat penerima bantuan dan perlu diadakannya pemindahan tempat atau penambahan (e-warung) pengambilan bantuan ke tempat yang mudah dijangkau oleh KPM guna memudahkan proses pengambilan bantuan tersebut serta pemerintah juga harus memperhatikan fasilitas yang digunakan dalam proses pelaksanaan BPNT agar tidak mengalami gangguan.
3. Pemerintah dan pihak yang terkait dalam pelaksanaan program BPNT harus terus bersikap baik serta meningkatkan pelayanan dalam proses penyaluran bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
4. Perlu juga dilibatkan pihak swasta guna mendukung sarana dan prasarana dari dana-dana CSR (*corporate resposnsibility*) agar terwujudnya kesatuan sebagai bentuk kebersamaan dalam mengentaskan fenomena kemiskinan yang berkembang khususnya di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur dan umumnya di Kota Tidore serta Indonesia secara luas.

Daftar Pustaka

- Ala, Andre Bayo. 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Guntur, Setiawan. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Moleong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses. Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Suharto. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Said, Rusli (ed). 1995. *Metodologi Identifikasi Golongan dan Derah*

Miskin: Suatu Tinjauan dan Alternatif. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Utama dan Institut Pertanian Bogor.

Abddulah, R. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik, 11, 1-12.

Bps. Depsos. 2002. *Penduduk Fakir Miskin Indonesia*. Jakarta: Bps.

Josep. 2018. *Konsep dan Strategi Pemerintah dalam Peluang Kemiskinan*. Jakarta: Indocamp.

Solichin, Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan dari Forumulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.